



BOS SMA/SMK di Badung Rp 19 M

Untuk alat tulis kantor (ATK) sekolah negeri dialokasikan Rp 1,1 miliar. BOS untuk sekolah negeri dalam bentuk kegiatan, sekolah swasta dalam bentuk hibah.

MANGUPURA, NusaBali
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora)

Kabupaten Badung menggelontorkan dana BOS (bantuan operasional sekolah) tahun 2015 sekitar Rp 19 miliar kepada SMA dan SMK negeri maupun swasta. Bila pemberian BOS untuk SMA/SMK swasta berbentuk hibah, sekolah negeri diberikan dalam bentuk kegiatan.

Tahun ini bantuan BOS untuk sekolah negeri diberikan dalam bentuk pengadaan ATK (alat tulis kantor). Tender proyek seperti terpasang di LPSE Pemkab Badung, bernama Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Mengajar SMA, SMK negeri di Kabupaten Badung (BOS APBD) Belanja

Barang dan Jasa Dana BOS (ATK). Anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp 1,1 miliar.

Kabid Pendidikan Disdikpora Badung I Made Mandi membenarkan tender pengadaan ATK tersebut. Sayangnya ia mengaku tidak hafal perincian proyek. "Waduh datanya ada di kantor, saya lupa pastinya. Tapi kalau saya tidak salah ada 54 jenis, seperti untuk kertas dan alat tulis kantor," jelasnya, Minggu (30/8).

Masing-masing sekolah mendapatkan sesuai dengan kebutuhan. Pembagiannya melihat jumlah siswa setiap sekolah.

Dikatakannya, bantuan dana

sekolah SMA/SMK swasta tetap memperoleh bantuan BOS dari pemerintah. Tetapi bedanya dana diberikan dalam bentuk hibah. "Untuk SMA swasta dapat Rp 1 juta per siswa setiap tahun. Sementara SMK swasta mendapatkan Rp 1,5 juta setiap tahun. Di Badung itu ada 11 SMA swasta dan 20 SMK swasta," beber Mandi.

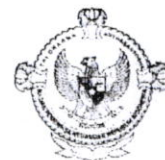
"Total dana BOS untuk tahun 2015 sebesar Rp 19 miliar untuk SMA dan SMK, baik negeri maupun swasta. Seperti yang saya bilang tadi, kalau sekolah negeri BOS diberikan dalam bentuk kegiatan, sedangkan sekolah swasta dalam bentuk hibah," tandasnya. **as**

BOS dibedakan antara sekolah negeri dan swasta. Kalau untuk sekolah negeri dana BOS diberikan dalam bentuk kegiatan, misalnya pembelian ATK, alat kebersihan sekolah, dan lain-lain. Sedangkan untuk sekolah swasta diberikan dalam bentuk hibah. Nah, untuk pengadaan ATK, jelas Mandi, karena nilai tender di atas Rp 200 juta, maka wajib tender. "Jadi kami yang melakukan tender ini, nanti baru didistribusikan ke sekolah-sekolah," katanya. Untuk sekolah negeri di Badung tercatat SMA ada delapan dan SMK ada dua.

Bagaimana dengan yang swasta? Mandi mengatakan,

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015

Hal : 2



Pencairan Dana Desa Banyak Ngadat di Tingkat Kabupaten



• NUSABALI/DEWA

MENTERI Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Marwan Djafar, saat di Desa Tradisional Adat Panglipuran, Kubu, Bangli, Minggu (30/8).

BANGLI, NusaBali

Serapan dana desa yang dikurangkan pemerintah ke daerah hingga bulan Agustus ini terhitung masih sangat rendah, yakni baru mencapai sekitar 36 persen. Padahal pihak pemerintah mengaku sudah memperpendek birokrasi dan syarat pencairan dana desa itu. Demikian dikatakan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Marwan Djafar, saat mengadakan tatap muka dengan Kepala Desa se-Kabupaten Bangli, di Taman Makam Pahlawan Desa Pakraman Panglipuran, Kubu, Bangli, Minggu (30/8).

Kata dia, sejatinya dana desa ini telah cair seratus persen dari pemerintah pusat ke daerah. Hanya saja di daerah tingkat kabupaten masih

mengalami kendala mengenai pencairannya ke desa. Karenanya, dari Bangli pihaknya mengimbau supaya bupati dan wali kota se Indonesia segera mencairkan dana desa ini ke desa. Dengan demikian dana ini bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di desa. "Kita juga sudah mempermudah pencairan dan memperpendek proses pencairan," tegasnya.

Mengenai masih adanya ketakutan pihak desa menggunakan dana itu, kata dia, payung hukumnya sudah cukup jelas. Jadi kalau pihak aparat desa menggunakan dana desa ini mesti sesuai juklak dan juknis yang ada dalam Permendes. Kalau perbekel maupun aparat desa berjalan di atas rel itu tentu tidak ada ketakutan terjerat kasus pidana.

"Kita juga sudah mengeluarkan surat guna mempermudah penyusunan APBDes, RPJMDes serta rencana kerja desa. Kalau aslinya kan tebal, jadi kita sudah mempermudah sehingga dana desa ini dapat segera terealisasi ke desa-desa," ujarnya.

Lanjut menambahkan, untuk peruntukan dana desa juga dipermudah. Mengenai prioritas pihaknya menekankan untuk pembangunan jalan desa dan irigasi desa, jadi lain-lain bisa diabaikan dulu. Marwan Djafar, saat itu juga memberikan apresiasi khusus untuk Bali. Kata dia, dana desa di Bali sudah hampir semua disalurkan ke desa.

Dia mengimbau supaya pihak kepolisian dan kejaksaan jangan buru-buru melakukan pengusutan terkait penggunaan dana desa. Kalau memang sifatnya administratif, pihaknya meminta aparat desa jangan dipidanakan. Lanjut menyebutkan, untuk tahun 2015 dana desa yang dicarikan mencapai Rp 200 juta hingga Rp 400 juta. "Tahun depan pencairan bakal meningkat dua kali lipat, yakni 600 juta hingga Rp 800 juta," ujarnya.

Sementara Penjabat Bupati Bangli Dewa Made Mahendra Putra, mengatakan selama ini Pemkab Bangli telah komitmen melakukan pembangunan dari desa. Sementara soal dana desa, Bangli tahun 2015 menerima sebesar Rp 19,1 miliar. Dana itu diterima 44 desa, dengan jumlah terbesar diterima Desa Songan B, Rp 400 juta lebih dan terkecil diterima Desa Buntin, Rp 266 juta lebih. **cr53**

Edisi : Senin, 31 Agustus 2015
Hal : 8